

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan. Salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan dan bentuk penyediaan PSU dilingkup kawasan perumahan setelah mengidentifikasi penyediaan PSU berapa persentase RTH Publik tersedia dan bagaimanakah ketersediaannya karena RTH Publik sebagai bagian dari PSU. Dalam kajian ini lebih memfokuskan ke RTH Publik sebagai bagian dari PSU.

Perumahan yang ada terkadang masih banyak yang belum memiliki lingkungan yang mendukung keberlangsungan kegiatan bermukim masyarakat. Akan tetapi para penghuni lebih berpikir ke mengenai unit rumah yang mereka miliki tanpa melihat kualitas lingkungan dan juga prasarana, sarana dan utilitas. Dan kondisi PSU yang dibawah standar dapat membuat semakin buruknya kondisi perumahan apalagi salah satu bagian dari PSU yaitu ruang terbuka hijau publik sangat berpengaruh karena dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota semakin lama semakin meningkat seperti tumbuh dan berkembangnya fasilitas perkotaan dan mengakibatkan banyaknya perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan. Dengan kemajuan suatu pembangunan umumnya dapat merugikan keberadaan Fasilitas umum dan fasilitas sosial. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan keberadaan fasilitas sosial dan umum untuk mendukung aktivitas dan salah satu bagiannya yaitu ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga lebih murah, relatif, sehat, dan nyaman.

Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan kedua peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Padang nomor 07/ PD/ 1978 tentang fatwa perencanaan lingkungan (*Advis Planing*) dalam Kotamadya daerah tingkat II Padang yaitu untuk memperoleh fatwa perencanaan

lingkungan (Pengkabupatenan) dari Walikotaamadya Kepala Daerah, pemilik tanah diharuskan menyerahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Daerah 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas tanahnya yang akan digunakan untuk fasilitas umum (seperti sarana perniagaan, pemerintahan, pelayanan umum, jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau) fasilitas sosial (seperti sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi, peribadatan, olahraga dan daerah terbuka dan tanah cadangan pengganti).

Kecenderungan menurunnya kualitas dan kuantitas penyediaan dan pemanfaatan lahan PSU dan akan kesadaran fungsi dari lahan PSU tersebut karena perumahan yang dtunjang dengan adanya berbagai fasilitas sosial dan umum maka akan mempermudah serta mendukung aktivitas para penghuni. Khususnya pada objek penelitian prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan yang ada pada Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Di Kecamatan Nanggalo pada saat ini telah banyak developer dalam mengembangkan dan pembangunan kawasan perumahan sehingga perlunya melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan pemanfaatan lahan prasarana, sarana, dan utilitas khususnya untuk bagian dari PSU yaitu ruang terbuka hijau publik perumahan di Kecamatan Nanggalo dan secara administrasi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Nanggalo sangat dekat dengan Ibu Kota Padang yang berkisar antara 3-6 kilometer sehingga perkembangan di Kecamatan Nanggalo dapat meningkat pesat karena terpengaruhi dengan perkembangan kota dan juga dapat dikatakan Kecamatan Nanggalo daerahnya hinterland Kota Padang sehingga perlu memperhatikan perkembangannya salah satunya yaitu yang pembangunan perumahan. Dan pembangunan perumahan haruslah menyediakan prasarana, sarana, yang sesuai dengan standar agar perkembangan kota terimbangi. Oleh sebab itu perlunya mengidentifikasi lahan PSU serta peneliti lebih fokus ke bagian dari PSU yaitu RTH Publik Perumahan yang ada di Kecamatan Nanggalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas untuk identifikasi ketersediaan dan bentuk pemanfaatan lahan PSU di Kecamatan Nanggalo sebagai berikut

1. Berapa ketersediaan lahan prasarana, sarana, dan utilitas, serta lebih memfokuskan kajian ke bagian dari lahan PSU yaitu RTH Publik yang sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 di lingkungan perumahan Kecamatan Nanggalo, Kota Padang

2. Bagaimanakah kebijakan dan pemanfaatan lahan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan Kecamatan Nanggalo berdasarkan tentang fatwa perencanaan lingkungan (*Advis Planing*) dalam Kotamadya daerah tingkat II Padang yaitu untuk memperoleh fatwa perencanaan lingkungan (Pengkaplingan) dari Walikotamadya Kepala Daerah, pemilik tanah diharuskan menyerahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah daerah 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas tanahnya yang akan digunakan untuk fasilitas umum (seperti sarana perniagaan, pemerintahan, pelayanan umum, jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau) fasilitas sosial (seperti sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi, peribadatan, olahraga dan daerah terbuka dan tanah cadangan pengganti).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi keberadaan dan mengetahui tingkat ketersediaan lahan prasarana, saran, dan utilitas serta lebih memfokuskan kajian ke bagian dari PSU yaitu RTH Publik di lingkungan perumahan Kecamatan Nanggalo.
2. Mengetahui pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas dan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk, tipe dan karakternya di lingkungan perumahan Kecamatan Nanggalo.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Kawasan Studi

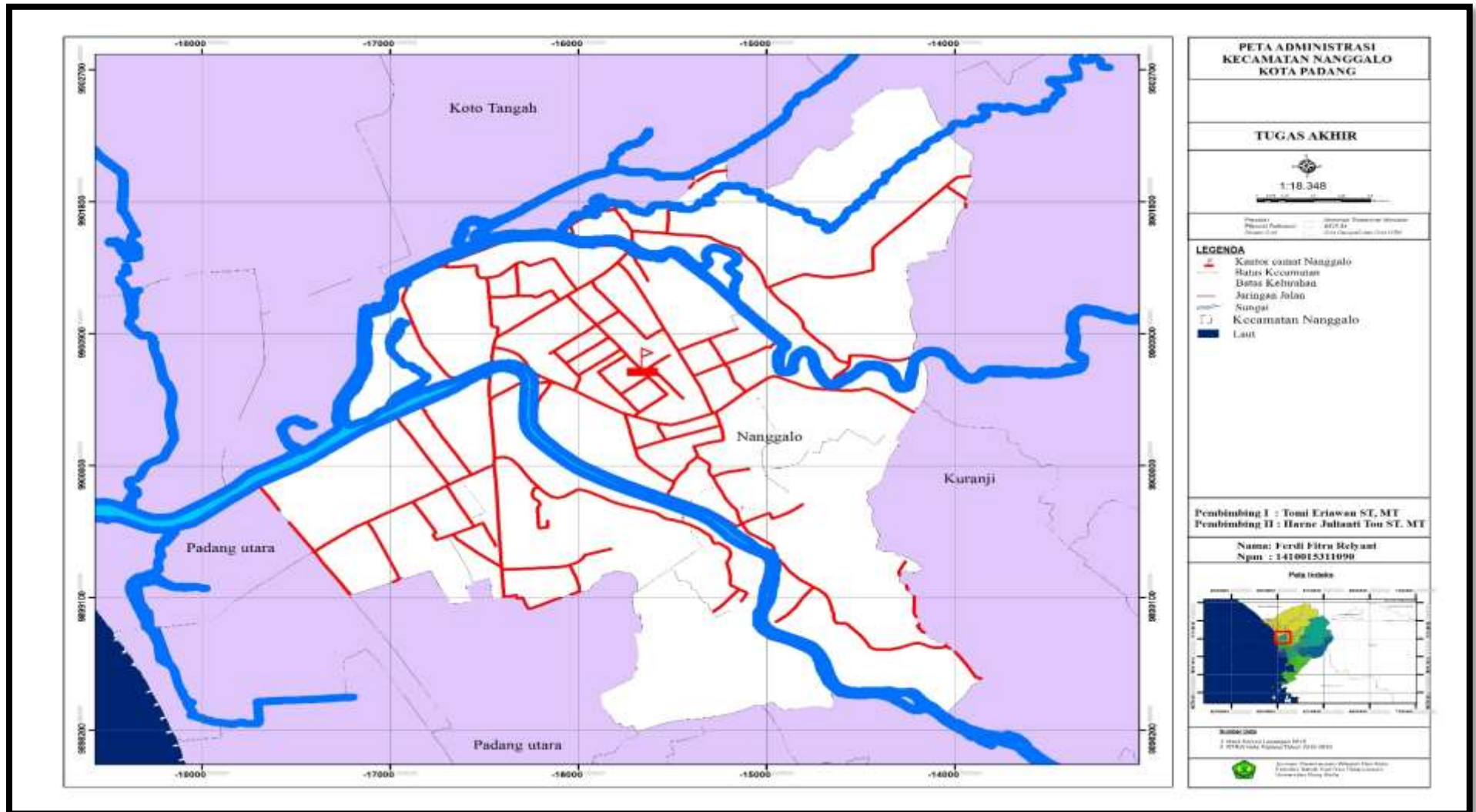
Ruang lingkup wilayah untuk penelitian ini adalah di kawasan salah satu di Kota Padang yang kepadatannya tinggi. Dimana kawasan yang dijadikan sebagai wilayah studi adalah Kecamatan Nanggalo, pemilihan lokasi ini dikarenakan para pengembang perumahan telah banyak mengembangkan dan membangun perumahan dikawasan ini. Selain itu Kecamatan Nanggalo sangat dekat dengan Ibu Kota Padang yang berkisar antara 3-6 Kilometer sehingga perkembangan di Kecamatan Nanggalo dapat meningkat pesat karena terpengaruhi dengan perkembangan kota. Untuk ruang lingkup wilayah studi yaitu Kecamatan Nanggalo Secara geografis wilayah berada antara 0°58" LS dan 100° BT dengan luas wilayah 8,07 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Koto Tangah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Utara

- Sebelah Barat : Kecamatan Padang Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Kuranji

Lingkup wilayah dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu ruang lingkup lokasi penelitian dan ruang lingkup materi pembahasan, yang dimana untuk ruang lingkup lokasi berada pada lingkungan perumahan Kecamatan Nanggalo.

Gambar 1.1
Peta Kawasan Studi



1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Menurut Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai. Berdasarkan hasil observasi dilapangan berbentuk, taman, area terbuka, dan lapangan olahraga.

Didalam ruang lingkup materi ini menjelaskan bahwa daerah penelitian yang dikaji yaitu Kota Padang dengan studi kasus berlokasi di Kecamatan Nanggalo dimana kecamatan ini termasuk kedalam kategori Kecamatan yang pengembang perumahannya telah pesat. Objek yang ditelaah dipenelitian ini adalah pengembang perumahan dan peran pemerintah yang akan memberikan persepsi terhadap objek kajian ini. Keterlibatan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik ini telah tertuang didalam RTRW Kota Padang, namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya peran keikutsertaan pemerintah dalam memberikan arahan tentang PSU diperumahan. Adapun salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu para pengembang perumahan yang mengabaikan fungsi dan kegunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dilingkungan perumahan lebih mengutamakan pembangunan hunian untuk penghuni serta kurang tegasnya kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan pembangunan perumahan. Sehingga kendala tersebut diatasi dengan dimanfaatkannya lahan tersisa dalam pembangunan.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai yakni berdasarkan tingkat kepadatan yang mana mencakup kondisi eksisting yaitu ketersediaan lahan PSU seperti fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, jalan, dan lain-lain setelah diidentifikasi maka turunannya yaitu mengkaji salah satu bagian dari PSU yaitu RTH Publik dengan menilai dan mengamati bentuk penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk serta dinilai berupa fungsi taman, tipe taman, karakter taman, pengguna taman serta aktivitas taman sehingga dapat diketahui bentuk penyediaan dan karakternya serta sebaran lokasi penyediaan Adapun batasan studi dalam kajian ini adalah :

Batasan Studi :

1. PSU yang dimaksud disini adalah bentuk pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka hijau publik sementara jenis PSU lain seperti prasarana tidak dibahas. Untuk lokasi kawasan studi yang dipilih yaitu Kecamatan penggunaan lahan terbangun permukimannya, berada pada aktivitas yang mempengaruhi kepadatan misalnya pemerintahan yang ditandai dengan dekatnya Ibu Kota Padang.
2. Kemudian untuk fokus kajian difokuskan pada pengamatan pendekatan terhadap bentuk penyediaan fasilitas umum dan sosial di perumahan.
3. Karakteristik penggunaan yang diamati adalah semua bentuk penyediaan yang berada pada lingkungan perumahan, meliputi fasilitas umum dan sosial.
4. Setelah itu, dilakukan analisa pemanfaatan sehingga dapat diketahui ukuran persentase yang tersedia pada tiap-tiap perumahan serta diketahui juga kesesuaiannya.
5. Setelah diketahui ketersediaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan, lalu diidentifikasi bagian dari PSU tersebut yaitu RTH Publik lalu perumahan mana saja telah menyediakan RTH Publik dan mana yang lebih dominan penyediaannya berdasarkan ketentuan Undang undang penataan ruang dan peraturan daerah Kota Padang.
6. Kemudian pada rangkuman analisis, yang dimuat dalam rangkuman tersebut menggunakan acuan Peraturan daerah Kota Padang dan RTRW Kota Padang dikarenakan penelitian berada pada wilayah ini.

Hasil Studi :

Setelah melakukan tahapan analisis dengan melakukan kajian-kajian terhadap penyediaan PSU dan lebih memfokuskan ke bagian PSU yaitu RTH Publik pada kawasan studi maka akan dikeluarkan hasil identifikasi penyediaannya pada kawasan studi dengan peraturan Undang-undang Penataan Ruang dan peraturan daerah Kota padang baik Standar/kebijakan/pedoman/dan teori yang berkaitan.

Dari lingkup materi tersebut keluaran yang diharapkan dari studi ini adalah ***"Identifikasi Ketersediaan dan Bentuk Penyediaan PSU Pada Kawasan Perumahan (Studi Kasus: Kecamatan Nanggalo)"***

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data, terdapat 2 jenis data diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan survey instansional yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui survey sekunder pada instansi terkait dan kajian literatur. Adapun data yang diambil dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Data sekunder

Tahap	Cara	Sumber	Data-data	Guna	
Survey Sekunder	Kajian Literatur	Perpustakaan dan internet	Buku-buku artkikel, jurnal dan makalah	Menjadikan pedoman untuk mengetahui peraturan-peraturan terkait dengan perumahan, lahan PSU, serta ruang terbuka hijau	
			Permen No. 05 Tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau		
			UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan		
			Peraturan Daerah tingkat II Kota Padang No 6 tahun 1996		
	Survey Intansi	BAPPEDA	Buku		Konsep dan standar Lingkungan Perumahan (Perencanaan Tapak Perumahan)
					Peta Administrasi Kota Padang
					Peta Penggunaan Lahan
		Dinas PU	Dinas Perumahan dan Permukiman		Peta Administrasi Kecamatan Nanggalo
					Kebijakan-kebijakan lain terkait tentang RTRW Kota Padang
					Peta Sebaran Perumahan

Sumber: List Data, Tahun 2019

2. Pengumpulan data primer

Yaitu dengan melihat langsung kondisi eksisting kawasan studi di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Data yang dikumpulkan di lapangan berupa observasi guna melihat keadaan eksisting wilayah terutama melihat eksisting karakteristik dan sebaran fasilitas umum dan sosial, dan melakukan wawancara dengan Stakeholder jika diperlukan, yang nantinya digunakan untuk melengkapi kekurangan dari data sekunder. Untuk pengukuran luas lahan menggunakan dua cara

yaitu dilakukan survey lapangan terlebih dahulu untuk melihat kawasan perumahan untuk mengamati ketersediaan PSU dan memfokuskan ke bagian dari PSU yaitu RTH Publik lalu ditandai dipeta, setelah itu lalu dilakukan digitasi menggunakan software Arcgis untuk disesuaikan dan keakuratan data. Alat yang digunakan dalam observasi kondisi prasarana, sarana, dan utilitas berupa kamera, alat tulis, form survey dan berupa pertanyaan ke stakeholder Adapun data yang diambil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Primer

No	Tahap Survey	Cara Survey	Sumber	Data-data	Guna	Keterangan
1.	Survey Primer	Observasi	Kawasan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan kondisi existing bentuk penyediaan PSU • Menandakan titik-titik luas perumahan • Mendeliniasi lokasi PSU publik di peta survey • Pengamatan lokasi penyediaan Fasos dan Fasum • Pengamatan karakteristik pemanfaatannya 	Untuk mengetahui bentuk penyediaan serta luas lahan pada kondisi existing wilayah studi	Observasi dilakukan dengan pengambilan foto kondisi existing terhadap karakteristik objek yang akan diteliti yang dilakukan pada perumahan yang ditentukan dan menggunakan landasan berdasarkan peraturan daerah di Kecamatan Nanggalo
		Form Survey	Kawasan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan RTH diperumahan 	Mengetahui bagaimana bentuk penyediaan PSU dan gaian dari PSU yaitu RTH Publik pada perumahan dengan cara mengisi formulir yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan juga beberapa pertanyaan untuk stakeholder	Jenis form survey yang digunakan dal proses pengumpulan data ialah sudah ditentukan dan tinggal menandai dan mengisi sesuai kondisi existing. Adapun perangkat yang digunakan adalah form survey dan alat tulis.
		Dokumentasi/ perekaman	Handphone / Kamera digital	<ul style="list-style-type: none"> • PSU • Bentuk PSU • Lokasi 	Untuk merekam gambar statis mengenai situasi amatan, suatu aktivitas yang berguna agar data yang diukur tersebut lebih akurat dengan adanya media gambar ini.	

Sumber : List Data, 2019

1 Teknik Survey

Metode survey pada penelitian ini dilakukan dengan pembagian perwilayah dimana telah dibagi berdasarkan perkelurahan. Yang masing-masing diteliti/ diobservasi/ disurvey oleh 2 orang surveyor dan dilakukan seiringan dari 6 Kelurahan yang ada dikecamatan Nanggalo. Dengan pembagian tugas surveyor 1 menandakan titik lokasi, mendeliniasi lokasi serta mendokumentasi dan surveyor 2 untuk pengisian form survey dan menanyakan stakeholder yang ada disekitar lokasi. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan karena diteliti sebanyak 29 perumahan di Kecamatan Nanggalo.

1.5.2 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil survey yaitu ditabulasikan kedalam bentuk tabel biasa (searah). Adapun metode analisis yang dilakukan dalam studi identifikasi ketersediaan dan bentuk penyediaan PSU pada perumahan di Kecamatan Nanggalo yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif.

a. Identifikasi ketersediaan Lahan PSU

Analisis ketersediaan Lahan PSU dilakukan untuk mengetahui jumlah existing ketersediaannya, fungsi lahan PSU, dan sebaran PSU dilokasi penelitian. Analisis yang digunakan yaitu mengidentifikasi ketersediaan PSU dari data sekunder, setelah itu melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis dengan melakukan digitasi data spasial foto udara / citra satelit lingkungan perumahan. Setelah teridentifikasi PSU diperumahan dilakukan pengelompokan fungsi lahan yang digunakan seperti untuk fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, RTH Publik, jalan, dan lain-lain sesuai yang tersedia di perumahan tersebut.

b. Analisa Kebijakan PSU

Analisa ini dilakukan dengan melihat peraturan pada perundangan penataan ruang dan peraturan daerah dengan penyediaan persentase yang harus disediakan pada perumahan. Untuk peraturan daerah kota padang mengharuskan perumahan mengalokasikan untuk lahan PSU sekitar 30%. Dari hasil itu akan dibandingkan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara existing dan peraturan yang telah ada.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Luas Existing PSU (M}^2\text{)}}{\text{Luas Lahan (M}^2\text{)}} \times 100$$

c. Identifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau publik

Analisis ketersediaan RTH Publik dilakukan untuk mengetahui jumlah eksisting ketersediaan Unit perumahan, dan untuk RTH Publik, jenis RTH Publik, luas RTH Publik, serta sebaran RTH Publik yang ada di lokasi penelitian. Analisis yang digunakan yaitu mengidentifikasi ketersediaan RTH Publik dari data sekunder, peninjauan langsung ke lapangan dan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis dengan melakukan digitasi data spasial foto udara / citra satelit lingkungan perumahan, setelah itu melakukan perhitungan luas lahan objek penelitian yaitu besaran Ruang Terbuka Hijau Eksisting terhadap besaran lokasi objek penelitian yang dalam peraturan berdasarkan standar lingkungan perumahan untuk persentase luas penyediaan ruang terbuka hijau tergantung lingkungan berapa perumahan tersebut untuk lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Penyediaan RTH berdasarkan Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (M ²)	Luas Minimal/ Kapita (M ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah Lingkungan RT
2	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Dipusat wilayah/ kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Didalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008

Seperti perhitungan luas ketersediaan ruang terbuka hijau publik, maka dibuatlah rumus seperti di bawah ini :

Rumus : Untuk mencari jumlah penghuni, setiap satu rumah di asumsikan yang tinggal 4 orang (jiwa).

Jumlah Penghuni (jiwa) = Jumlah Unit rumah x N

Keterangan : N = asumsi satu rumah 4 orang (jiwa)

Dan untuk menentukan Luas RTH/ Jiwa, yaitu

$$\text{Luas RTH/ Jiwa} = \frac{\text{Luas Lahan Ruang Terbuka (M}^2\text{)}}{\text{Jumlah Penghuni (jiwa)}}$$

Kemudian dari hasil perhitungan itu akan diketahui apakah luasan RTH pada objek penelitian sudah sesuai dengan standar yang diatur pada Undang-Undang No. 26 tahun 2007 atau belum dan juga sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang.

d. Analisa Pemanfaatan

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas adalah bagian dari PSU yaitu ruang terbuka hijau publik terhadap fungsi taman, tipe taman, karakter taman, pengguna taman serta aktivitas taman sehingga dapat diketahui tipe taman dan karakter serta sebaran lokasi penyediaan RTH Publik. Dari hasil ini dapat diketahui pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perumahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini.

1. Untuk menentukan tipe taman berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008 ada dua yaitu aktif dan pasif dengan melihat berdasarkan aktivitas dan pengguna di taman tersebut. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Standar Analisis Tipe RTH di Perumahan

No	Nama Perumahan	Jumlah Taman (Unit)	Aktivitas Existing	Pengguna	Keterangan	Tipe Taman
1.	Nama Perumahan	Berapa yang tersedia berdasarkan hasil survey	<ul style="list-style-type: none">• Bermain• Berolahraga• Sekedar duduk• Mengobrol	<ul style="list-style-type: none">• Anak-anak• Remaja• Dewasa/ ibu rumah tangga• Lansia	Berdasarkan kondisi existing	Aktif dan Pasif

Sumber : Permen PU No 5 tahun 2008

2. Untuk menilai karakter taman ada 4 berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008 yaitu taman alamiah, taman binaan, lapangan olahraga, dan play ground. Cara menentukannya dengan melihat fungsi taman tersebut dan fasilitas yang tersedia dilokasi.

Tabel 1.5
Standar Analisis Karakter RTH di Perumahan

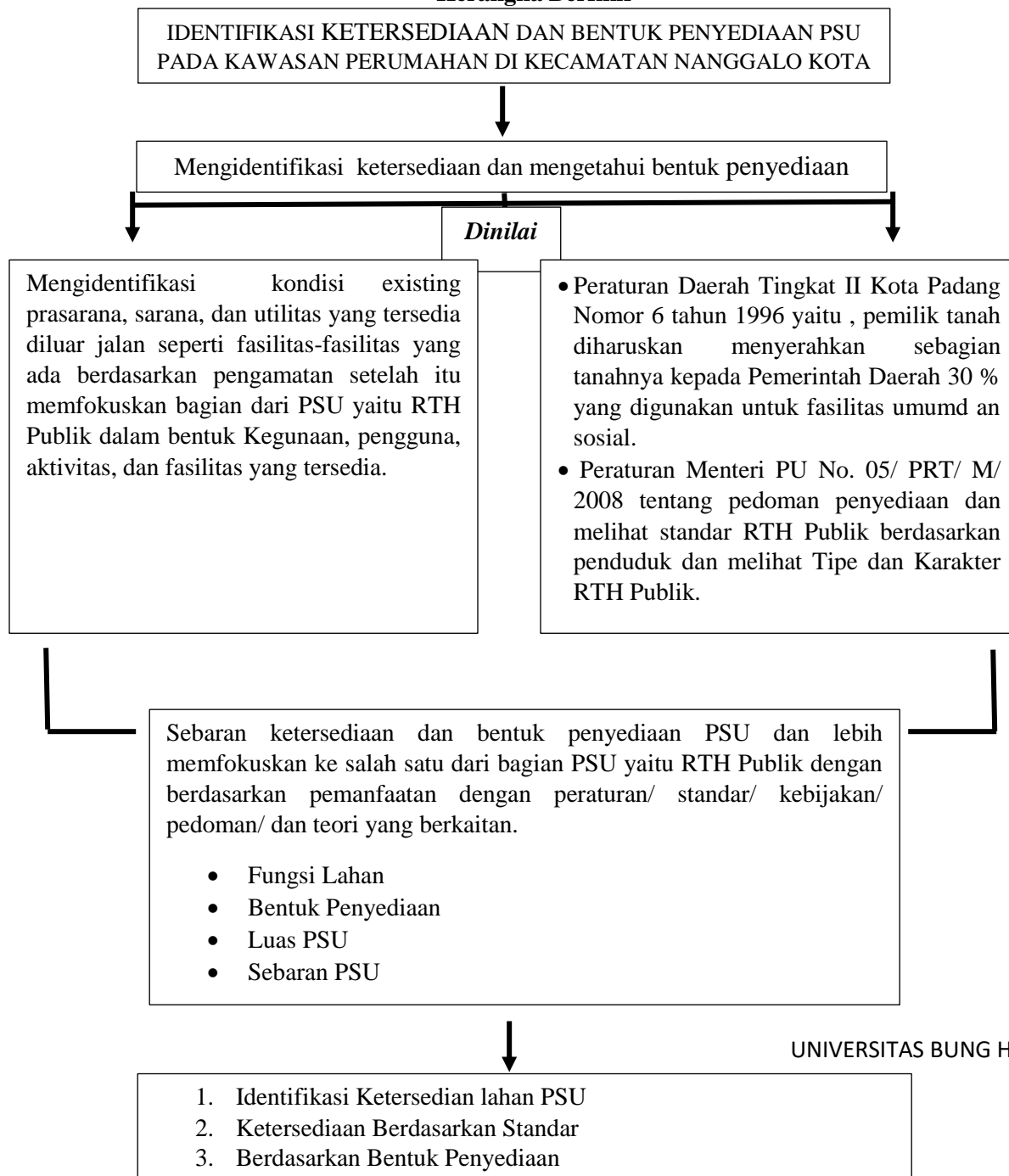
No	Nama Perumahan	Jumlah Taman (Unit)	Fungsi Existing	Fasilitas Existing	Keterangan	Karakter Taman
1.	Nama Perumahan	Berapa yang tersedia berdasarkan hasil survey	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Badminton • Lapangan Sepak Bola • Area Terbuka • Taman Bermain • Taman PKK, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan • Lampu Penerang • Tiang Net • Tong Sampah • Tanaman Hias • Pohon Pelindung, dll 	Berdasarkan kondisi existing	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Binaan • Tanaman Alamiah • Lapangan Olahraga • Play Ground

Sumber : Permen PU No 5 tahun 2008

1.6 Kerangka Berfikir

Adapun Kerangka Penelitian ini adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir



1.7 Review Teori

1. ***Pengelolaan lingkungan*** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. ***Ketersediaan***
(1) kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan di waktu yang telah ditentukan; (2) keadaan tersedia; hal tersedia
3. ***Klasifikasi PSU***, menurut fatwa perencanaan lingkungan (Pengkaplengan) dari Walikotamadya Kepala Daerah, pemilik tanah diharuskan menyerahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Daerah 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas tanahnya yang akan digunakan untuk fasilitas umum dan sosial.
4. ***Fasilitas umum dan fasilitas social***, merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.
5. ***Perumahan***, merupakan kelompok rumah yang membentuk satu kesatuan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana, serta sesuai pada dengan lokasi yang ada, guna mendukung aktivitas masyarakat aktif di dalamnya.
6. ***Ruang terbuka hijau publik***, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta disuatu kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
7. ***Kebijakan pengelelolaan PSU***, adalah suatu peraturan yang mendasar berupa pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai hasil dan tujuan yang ingin dicapai.

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan semua tentang latar belakang kegiatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas termasuk ruang terbuka hijau publik di

lingkungan perumahan Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini membahas tentang landasan teori tentang ketersediaan lahan PSU dan peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH Publik) bagi suatu perumahan, pengertian perumahan dan ruang terbuka hijau, peran dan fungsi ruang terbuka hijau, klasifikasi dan dasar hukum pemeliharaan ruang terbuka hijau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini membahas tentang analisis pendekatan penelitian yang tercakup lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data dan metode analisis. Dan bab ini menguraikan tentang letak dan batas geografis sebagai gambaran umum Kecamatan Nanggalo.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN bab ini memuat analisis penjelasan terhadap objek penelitian untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan lahan PSU berdasarkan hasil analisis dan wawancara , sesuai peran dan fungsi utama PSU di lingkungan perumahan sesuai acuan undang – undang yang terkait

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi kepada instansi yang terkait.

